

DEMOKRASI DIGITAL DAN MANIPULASI OPINI PUBLIK DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Madjid Fahdul Bahar

Universitas Jember

Email: madjidmuncar5@gmail.com

Diserahkan : 12 Maret 2026

Published : 21 April 2026

Abstrak

Demokrasi digital kerap dipahami sebagai perluasan ruang partisipasi warga negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan asumsi bahwa teknologi mampu memperkuat transparansi dan inklusivitas politik. Namun, dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi digital justru menjadikan ruang digital rentan terhadap disinformasi, misinformasi, dan manipulasi opini publik. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana rendahnya literasi digital memengaruhi pembentukan opini publik, dan bagaimana artificial intelligence (AI) berperan dalam memperkuat praktik manipulasi dalam demokrasi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis demokrasi digital sebagai medan relasi kuasa, pengetahuan, dan teknologi, serta mengungkap dampak penggunaan AI terhadap rasionalitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis wacana kritis dengan kerangka teori ruang publik dan hegemoni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI mempercepat produksi kebenaran semu melalui otomatisasi narasi dan konten sintetis, sementara ketiadaan regulasi yang komprehensif serta lemahnya pendidikan literasi digital menyebabkan publik cenderung menerima informasi tanpa verifikasi kritis. Demokrasi digital dalam kondisi ini tidak mengalami keruntuhan melalui represi langsung, melainkan melalui normalisasi kebohongan yang diterima sebagai kebenaran dan membentuk kepatuhan massal.

Kata kunci: demokrasi digital; disinformasi; literasi digital; artificial intelligence, manipulasi opini publik.

Abstract

Digital democracy is often understood as an expansion of civic participation through the use of information and communication technologies, based on the assumption that technology can enhance transparency and political inclusivity. However, in the Indonesian context, low levels of digital literacy render digital spaces highly vulnerable to disinformation, misinformation, and the manipulation of public opinion. This study departs from the question of how low digital literacy influences the formation of public opinion and how artificial intelligence (AI) contributes to the intensification of manipulative practices within digital democracy. The aim of this research is to analyze digital democracy as a field of power, knowledge, and technological relations, as well as to reveal the impact of AI on public rationality. This study employs a qualitative approach through a literature review and critical discourse analysis, drawing on theories of the public sphere and hegemony. The findings indicate that AI accelerates the production of pseudo-truths through the automation of narratives and synthetic content, while the absence of comprehensive regulation and weak digital literacy education lead the public to accept information without critical verification. Under these conditions, digital democracy does not collapse through direct repression, but rather through the normalization of falsehoods that are accepted as truth and that shape mass compliance.

Keywords: digital democracy; disinformation; digital literacy; artificial intelligence; public opinion manipulation.

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Demokrasi digital sering dirayakan sebagai tahap lanjut dari emansipasi politik modern. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, ruang partisipasi publik diyakini semakin terbuka, suara warga dianggap setara, dan akses terhadap informasi dipahami sebagai fondasi rasionalitas demokrasi. Namun, di balik perayaan tersebut tersembunyi satu persoalan mendasar: kebebasan yang tidak disertai kesadaran kritis justru melahirkan bentuk kekuasaan yang lebih halus dan lebih efektif. Demokrasi digital, alih-alih membebaskan, berpotensi menata ulang kepatuhan dalam wujud yang tampak sukarela. Dalam konteks Indonesia, optimisme terhadap demokrasi digital berhadapan dengan kondisi literasi digital yang belum matang. Ruang digital tidak sepenuhnya diisi oleh pertukaran argumen rasional, melainkan oleh arus emosi, identitas, dan narasi yang diulang tanpa diuji. Data Indeks Literasi Digital Nasional menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis masyarakat masih berada pada tingkat yang rentan terhadap manipulasi informasi, terutama dalam isu-isu politik dan kebijakan publik (Margetts, John, Hale, & Yasseri, 2016; Kementerian Kominfo, 2023). Dalam situasi demikian, opini publik tidak terbentuk melalui penalaran, melainkan melalui kebiasaan menerima.

Perkembangan artificial intelligence memperdalam kerentanan tersebut. AI tidak hanya mempercepat produksi informasi, tetapi mengubah mekanisme pembentukan kebenaran. Melalui konten sintetis, deepfake, dan sistem rekomendasi algoritmik, informasi diproduksi secara massal dan disesuaikan dengan preferensi pengguna, sehingga kebenaran tampil bukan sebagai hasil verifikasi, melainkan sebagai apa yang paling sering hadir di hadapan publik. Teknologi AI mampu mengaburkan batas antara fakta dan fabrikasi. Demokrasi digital dalam kondisi ini tidak mengalami krisis karena ketiadaan kebebasan berbicara, melainkan karena berlebuhnya suara yang kehilangan makna. Ketika segala sesuatu dapat diucapkan, tidak semua hal lagi dipertanyakan. Kekuasaan bekerja bukan dengan membungkam, tetapi dengan memenuhi ruang publik dengan narasi yang cukup meyakinkan untuk diterima tanpa perlawanan.¹ Opini publik kemudian terbentuk bukan dari kehendak sadar warga, melainkan dari apa yang terus-menerus dihadirkan dan diulang².

Kajian akademik mengenai demokrasi digital dan disinformasi telah menunjukkan bahwa teknologi komunikasi modern cenderung memperkuat logika afeksi dan ekonomi perhatian. Disinformasi bekerja efektif bukan karena kebenarannya, melainkan karena kemampuannya memobilisasi emosi dan memanfaatkan algoritma platform digital³. Rasionalitas ruang publik semakin terdistorsi oleh logika media dan kepentingan sistem, sementara artefak digital selalu membawa muatan politik karena dibangun dan dioperasikan dalam relasi kekuasaan tertentu⁴. Namun, kajian yang secara spesifik mengaitkan artificial intelligence dengan pembentukan hegemoni opini publik dalam demokrasi digital Indonesia masih terbatas.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya membaca demokrasi digital sebagai persoalan kesadaran dan kekuasaan, bukan sekadar masalah teknis atau regulatif. Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa krisis demokrasi digital tidak terutama disebabkan oleh kurangnya teknologi atau regulasi, melainkan oleh kegagalan membangun subjek warga yang kritis. Artificial intelligence dalam kerangka ini dipahami bukan sebagai alat netral, tetapi sebagai teknologi yang mempercepat normalisasi narasi dominan dan memperhalus mekanisme penundukan opini publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan

¹ Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics*. Oxford University Press.

² Grajales, F. J., Shepherd, T., & Torres, A. B. (2020). Algorithmic politics: Political communication in the age of computational propaganda. *Journal of Communication*, 70(2), 298–316. <https://doi.org/10.1093/joc/jqaa006>

³ Chadwick, A., & Dennis, J. (2019). Social media, professional media, and mobilization in contemporary Britain: Explaining the strengths and weaknesses of the mediated public sphere. *Political Communication*, 36(1), 50–74. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1476428>

⁴ Flew, T., & Iosifidis, P. (Eds.). (2019). *The Routledge companion to global media and communication policy*. Routledge.

analisis wacana kritis. Sumber data mencakup jurnal ilmiah, buku teori sosial dan politik, dokumen kebijakan pemerintah terkait literasi digital dan pengembangan AI, serta kajian akademik internasional terpercaya.⁵ Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana relasi antara pengetahuan, teknologi, dan kekuasaan bekerja dalam praktik demokrasi digital, khususnya dalam pembentukan dan sirkulasi opini publik⁶.

Landasan teoretis penelitian ini bertumpu pada teori ruang publik, konsep hegemoni, dan kajian kritis teknologi. Ketiga kerangka ini digunakan untuk memahami bagaimana demokrasi digital dapat kehilangan watak deliberatifnya ketika rasionalitas publik digantikan oleh repetisi narasi dan logika algoritma.⁷ Dengan kerangka tersebut, artikel ini tidak hanya mengkaji gejala disinformasi, tetapi juga menelusuri kondisi sosial yang memungkinkan kebohongan diterima sebagai kebenaran⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan menganalisis secara eksplisit tiga pokok persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia membentuk kerentanan struktural terhadap disinformasi; (2) bagaimana artificial intelligence berperan dalam mempercepat produksi dan normalisasi kebenaran semu; serta (3) bagaimana relasi kuasa yang bekerja melalui algoritma dan teknologi digital membentuk praktik demokrasi yang menjauh dari rasionalitas deliberatif dan kesadaran kritis warga negara.

PEMBAHASAN/DISCUSSION

Demokrasi Digital dan Ilusi Partisipasi Ketika Kuantitas Menggantikan Makna

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi digital di Indonesia lebih banyak memproduksi kesan partisipasi dibandingkan partisipasi yang bersifat substantif. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital memang membuka ruang ekspresi yang sebelumnya tertutup, namun keterbukaan tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kesadaran politik warga. Partisipasi yang tampak aktif di ruang digital sering kali berhenti pada tataran kehadiran simbolik, bukan keterlibatan reflektif dalam proses pengambilan makna dan penilaian politik. Demokrasi digital dalam praktiknya lebih merayakan keterlihatan daripada pemahaman, lebih memuja kehadiran angka daripada ketajaman nalar. Indikator partisipasi digital yang dominan bersifat kuantitatif. Jumlah unggahan, komentar, tanda suka, dan sebaran dijadikan ukuran keberhasilan keterlibatan politik. Namun, indikator tersebut tidak pernah mengukur kedalaman argumen, koherensi penalaran, atau kesediaan untuk menguji klaim yang beredar⁹. Partisipasi direduksi menjadi aktivitas mekanis yang dapat diakumulasi, dihitung, dan ditampilkan secara statistik. Dalam kondisi ini, partisipasi kehilangan dimensi etis dan kritisnya, lalu berubah menjadi rutinitas yang dijalankan tanpa kesadaran akan konsekuensinya¹⁰.

Kondisi tersebut sejalan dengan analisis Dahlgren (2013) yang menyatakan bahwa demokrasi digital cenderung melahirkan bentuk partisipasi ekspresif, bukan partisipasi deliberatif. Ekspresi menggantikan argumentasi, dan pernyataan sikap menggantikan proses berpikir.¹¹ Dalam konteks Indonesia, ekspresi digital sering kali menjadi medium pelampiasan

⁵ Vaccari, C. (2020). *Public opinion in the digital age: How technology shapes attitudes*. Polity Press.

⁶ Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

⁷ Bruns, A. (2019). *After the protest explosion: Digital methods for social research*. UCL Press.

⁸ Grajales, F. J., Shepherd, T., & Torres, A. B. (2020). Algorithmic politics: Political communication in the age of computational propaganda. *Journal of Communication*, 70(2), 298–316. <https://doi.org/10.1093/joc/jqaa006>

⁹ Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity A critical history of social media*. Oxford University Press.

¹⁰ Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.

¹¹ Dahlgren, P. (2013). *The political web Media, participation and alternative democracy*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137283229>

emosi kolektif, afiliasi identitas¹². serta peneguhan posisi kelompok. Media sosial tidak diperlakukan sebagai ruang dialog, melainkan sebagai panggung afirmasi diri. Pandangan yang berbeda tidak dihadapi sebagai tantangan intelektual, tetapi sebagai ancaman terhadap identitas. Data Indeks Literasi Digital Nasional menunjukkan bahwa dimensi budaya dan etika digital masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat sedang, sementara intensitas penggunaan media digital terus meningkat¹³. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk menggunakan teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis. Masyarakat lebih aktif sebagai produsen dan penyebar konten dibandingkan sebagai penilai kebenaran¹⁴. Informasi dikonsumsi dan disebar dalam kecepatan tinggi, tetapi jarang ditahan untuk diuji atau direnungkan.

Akibatnya, partisipasi digital berlangsung lebih cepat daripada pemahaman politik. Respons mendahului refleksi. Opini dibentuk sebelum fakta dipahami. Demokrasi digital dalam kondisi ini menciptakan paradoks yang mendalam. Semakin banyak suara yang hadir di ruang publik, semakin menipis makna yang dihasilkan. Ruang publik menjadi penuh oleh ujaran, tetapi miskin dialog. Setiap individu berbicara, namun tidak banyak yang sungguh mendengarkan. Kebebasan berekspresi tetap terjaga, tetapi kemampuan untuk membedakan antara suara yang lahir dari kesadaran kritis dan suara yang sekadar menjadi gema algoritmik semakin melemah. Dalam situasi tersebut, demokrasi digital tidak runtuh karena pembungkaman, melainkan karena kejenuhan makna. Partisipasi berubah menjadi ritual yang diulang tanpa refleksi, dan kebebasan berbicara kehilangan daya transformatifnya. Demokrasi tetap tampak hidup di permukaan, tetapi di kedalaman ia kehilangan orientasi dan arah. Jika kondisi ini dibiarkan, demokrasi digital akan terus memproduksi keramaian tanpa kesadaran, keterlibatan tanpa pemahaman, dan partisipasi yang hanya menjadi ilusi kolektif¹⁵.

Literasi Digital dan Disinformasi Dari Ketidaktahuan ke Kepatuhan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa rendahnya literasi digital di Indonesia bukan sekadar persoalan kurangnya keterampilan teknis, melainkan merupakan masalah struktural yang memengaruhi pembentukan kesadaran publik dan kapasitas kritis warga negara¹⁶. Literasi digital yang lemah membuat masyarakat kesulitan membedakan antara informasi, opini, dan manipulasi. Dalam kondisi ini, disinformasi tidak lagi dipersepsi sebagai ancaman yang harus dilawan, melainkan sebagai variasi narasi yang setara dengan fakta, sebuah fenomena yang menegaskan bahwa kuasa informasi tidak selalu terlihat melalui kekerasan, tetapi melalui pengaturan persepsi dan afeksi¹⁷.

Laporan resmi pemerintah menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi politik masih mendominasi ruang digital Indonesia, terutama pada isu kebijakan publik, kesehatan, dan pemilu¹⁸. Media Kompas melaporkan bahwa sebagian besar konten disinformasi diterima dan disebar karena kesesuaiannya dengan keyakinan atau emosi pengguna, bukan karena kredibilitas atau otoritas sumber¹⁹. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa masyarakat digital

¹² Sunstein, C. R. (2017). *Republic Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

¹³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks literasi digital nasional 2023*. <https://literasidigital.id>

¹⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Laporan penanganan konten hoaks dan disinformasi politik*. <https://www.kominfo.go.id>

¹⁵ UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms and artificial intelligence*. <https://www.unesco.org>

¹⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks literasi digital nasional 2023*. <https://literasidigital.id>

¹⁷ Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder Toward an interdisciplinary framework*. Council of Europe. <https://rm.coe.int>

¹⁸ Kompas. (2024, Februari 12). Rendahnya literasi digital dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial. <https://www.kompas.com>

¹⁹ Kompas. (2024, Februari 12). Rendahnya literasi digital dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial. <https://www.kompas.com>

modern tidak lagi beroperasi semata-mata melalui rasionalitas, melainkan melalui afeksi dan resonansi emosional. Disinformasi bekerja bukan karena warga bodoh, tetapi karena algoritma dan narasi memanfaatkan kecenderungan kognitif dan emosional manusia²⁰.

Dalam konteks ini, ketidaktahuan tidak lagi bersifat pasif. Ia bertransformasi menjadi bentuk kepatuhan sukarela. Publik tidak dipaksa untuk mempercayai informasi, tetapi dibiasakan untuk tidak mempertanyakan klaim yang diterima. Keraguan dipersepsikan sebagai sikap negatif atau bahkan tidak patriotik, sementara penerimaan cepat terhadap narasi populer dianggap sebagai kewajaran dan loyalitas terhadap komunitas digital²¹. Proses ini menegaskan bagaimana demokrasi digital tidak sekadar menghadirkan kebebasan berbicara, tetapi juga membentuk cara berpikir dan merasakan yang diharapkan oleh arsitektur platform dan kekuatan sosial ekonomi yang mengelolanya²².

Akibatnya, demokrasi digital memelihara warga yang aktif secara teknis, seperti mengunggah konten atau menyebarkan informasi, tetapi pasif secara kritis. Warga digital menjadi executor dari informasi yang disebarluaskan, bukan evaluator atau penentang yang sadar. Hal ini menimbulkan paradoks mendalam: semakin banyak warga berpartisipasi, semakin sedikit yang benar-benar berpikir. Ketidaktahuan dan kepatuhan sukarela menjadi dua sisi dari logika yang sama, di mana narasi dan algoritma berfungsi sebagai kekuatan terselubung yang menata opini publik tanpa terlihat, menghasilkan masyarakat yang sibuk tetapi tidak kritis

Dalam perspektif ini, disinformasi bukan sekadar gangguan teknis, melainkan krisis kesadaran dan epistemik yang membentuk struktur partisipasi digital itu sendiri. Ia menegaskan bahwa demokrasi digital bukan hanya berisiko mengalami kemerosotan karena represi politik, tetapi juga karena warga membiarkan dirinya terbawa oleh arus informasi yang disusun untuk menundukkan perhatian dan pikiran mereka, bukan untuk membebaskan mereka²³.

Artificial Intelligence dan Transformasi Kebenaran

Artificial intelligence muncul sebagai kekuatan yang secara radikal mengubah lanskap demokrasi digital dan proses produksi kebenaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa AI tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga mentransformasi cara kebenaran diproduksi, dinilai, dan dipersepsi oleh publik. Kemampuan AI untuk menghasilkan teks, gambar, audio, bahkan video yang menyerupai realitas menciptakan kondisi di mana keaslian dan verifikasi menjadi tantangan yang semakin sulit diatasi²⁴. Kebenaran tidak lagi lahir dari proses kritis kolektif, melainkan dari kemampuan teknologi untuk menghadirkan representasi yang paling meyakinkan dan paling sering muncul di hadapan pengguna²⁵.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan AI dan konten sintetis mulai dimanfaatkan dalam propaganda politik digital. Laporan *Tempo* (2023) mencatat peningkatan penggunaan deepfake, manipulasi video, dan teks otomatis untuk membentuk opini publik menjelang momen-momen politik penting²⁶. Narasi yang dihasilkan AI tidak hanya cepat dan luas sebarannya, tetapi juga dioptimalkan untuk resonansi emosional, sehingga lebih mudah diterima tanpa proses verifikasi rasional. Kondisi ini memperkuat dominasi narasi tertentu sekaligus menyingkirkan keraguan kritis publik. Pemerintah Indonesia menyadari risiko tersebut, namun regulasi yang ada saat ini masih bersifat fragmentaris dan lebih berfokus pada

²⁰ Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.

²¹ Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity A critical history of social media*. Oxford University Press.

²² Fuchs, C. (2021). *Social media A critical introduction* (3rd ed.). Sage.

²³ UNESCO. (2023). Guidelines for the governance of digital platforms and artificial intelligence.

<https://www.unesco.org>

²⁴ UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms and artificial intelligence*.

<https://www.unesco.org>

²⁵ Fuchs, C. (2021). *Social media A critical introduction* (3rd ed.). Sage.

²⁶ Tempo. (2023, November 8). AI, deepfake, dan manipulasi opini publik di era demokrasi digital.

<https://www.tempo.co>

keamanan data serta inovasi ekonomi daripada perlindungan rasionalitas publik²⁷. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia menempatkan AI sebagai alat untuk mendorong produktivitas dan inovasi, tetapi perhatian terhadap dampak epistemik dan politik masih terbatas. Akibatnya, ruang digital menjadi medan eksperimen teknologi yang berlangsung lebih cepat daripada kemampuan masyarakat dan negara untuk menyesuaikan diri.

Fenomena ini sejalan dengan kajian Fuchs (2021) yang menekankan bahwa teknologi digital modern tidak netral²⁸. AI beroperasi dalam logika kapitalisme dan kekuasaan, di mana algoritma dan sistem otomatis berfungsi untuk memperkuat dominasi dan mengatur persepsi publik. Dengan kata lain, AI bukan sekadar alat teknis, tetapi arsitek narasi yang membentuk opini dan keyakinan warga secara halus. Kebenaran tidak lagi diuji melalui rasio dan argumentasi, tetapi melalui konsistensi, frekuensi, dan kesesuaian narasi dengan preferensi pengguna.

Dalam perspektif ini, demokrasi digital berisiko berubah menjadi medan di mana opini publik dibentuk oleh teknologi yang memanipulasi persepsi, bukan oleh warga yang berpikir kritis. AI memampatkan proses deliberasi menjadi konsumsi pasif, di mana warga menjadi penerima narasi yang dihasilkan oleh mesin yang beroperasi di balik layar. Seiring waktu, ketergantungan pada representasi digital ini dapat melemahkan kapasitas warga untuk membedakan fakta dan fabrikasi, sehingga demokrasi digital tidak runtuh karena represi, tetapi karena produksi kebenaran semu yang diterima dan direproduksi sebagai kebenaran obyektif²⁹.

Algoritma sebagai Arsitek Kesadaran Publik

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa algoritma platform digital memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik dan menata cara masyarakat memandang realitas. Algoritma tidak sekadar memediasi informasi, tetapi juga mengatur perhatian publik dengan cara yang halus namun sangat efektif. Konten yang sesuai dengan logika keterlibatan emosional diperkuat melalui pengulangan dan prioritas tampil, sementara argumen kritis, data faktual yang kompleks, atau perspektif minoritas cenderung terpinggirkan³⁰. Hasilnya, publik secara tidak sadar diarahkan untuk mengonsumsi konten yang memuaskan bias afektif mereka, bukan konten yang memicu refleksi kritis.

Habermas (2006) telah mengingatkan bahwa ruang publik modern rentan terdistorsi oleh kepentingan sistem dan logika institusional. Dalam demokrasi digital berbasis algoritma, distorsi ini menjadi lebih sistematis dan tidak kasatmata³¹. Publik tidak diarahkan melalui larangan atau sensor terbuka, tetapi melalui pengaturan otomatis yang membentuk kebiasaan dan prioritas perhatian. Apa yang sering muncul dianggap penting; apa yang jarang terlihat dianggap tidak relevan. Fenomena ini semakin diperparah di Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat mendapatkan berita melalui media sosial dan platform digital yang dikendalikan algoritma, sehingga pola konsumsi informasi sangat dipengaruhi oleh logika platform itu sendiri³².

Dalam kerangka hegemoni, mekanisme algoritma menunjukkan bagaimana persetujuan dapat dibentuk tanpa paksaan terbuka. Sejalan dengan Gramsci (1971), opini publik tidak dipaksa untuk tunduk, tetapi diarahkan agar merasa nyaman dengan narasi tertentu³³. Algoritma

²⁷ Bappenas. (2023). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia*.

²⁸ Fuchs, C. (2021). *Social media A critical introduction* (3rd ed.). Sage.

²⁹ UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms and artificial intelligence*.
<https://www.unesco.org>

³⁰ Fuchs, C. (2021). *Social media A critical introduction* (3rd ed.). Sage.

³¹ Habermas, J. (2006). *The theory of communicative action Vol. 2 Lifeworld and system: A critique of functionalist reason* (T. McCarthy, Trans.). Polity Press.

³² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks literasi digital nasional 2023*.
<https://literasidigital.id>

³³ Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.

membentuk “zona kenyamanan” narasi, di mana publik cenderung menerima apa yang sering muncul dan menolak apa yang tidak terlihat atau jarang berulang. Dalam konteks demokrasi digital Indonesia, hal ini terlihat jelas pada isu politik dan kebijakan publik, di mana konten yang viral atau populer lebih menentukan persepsi warga dibandingkan bukti faktual yang sah³⁴.

Demokrasi digital dengan mekanisme algoritmik demikian berfungsi lebih sebagai mesin normalisasi perilaku dan opini, bukan sebagai arena diskursus dan perdebatan rasional. Algoritma mengubah ruang publik menjadi panggung yang memproduksi kesadaran yang dikontrol secara implisit, bukan tempat di mana argumentasi dan refleksi kritis menentukan orientasi opini publik. Dalam perspektif ini, demokrasi digital tidak hanya menghadirkan kebebasan berbicara, tetapi juga membentuk cara berpikir, merasakan, dan menerima kebenaran yang disesuaikan dengan logika platform dan kepentingan sosial ekonomi yang mengoperasikannya³⁵.

Akibatnya, publik aktif secara teknis tetapi pasif secara kritis. Mereka berbagi, menyukai, dan berkomentar, tetapi jarang menguji kebenaran atau mempertanyakan bias yang ada. Demokrasi digital berubah menjadi arena di mana konsensus terbentuk melalui pengulangan dan kenyamanan algoritmik, bukan melalui deliberasi rasional dan refleksi independen. Fenomena ini menegaskan bahwa algoritma berfungsi sebagai arsitek kesadaran publik yang halus, menentukan siapa yang didengar, apa yang dianggap penting, dan apa yang dilupakan, sekaligus memelihara status quo tanpa intervensi represif³⁶.

Negara, Regulasi, dan Keterlambatan Kesadaran Politik

Pembahasan menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya siap menghadapi transformasi kekuasaan yang terjadi dalam demokrasi digital. Regulasi yang ada saat ini masih lebih banyak berfokus pada pengendalian konten ilegal, ujaran kebencian, atau ekstremisme, tanpa menyentuh persoalan struktural yang lebih mendasar seperti algoritma, pemanfaatan artificial intelligence, dan mekanisme produksi opini publik³⁷. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia menempatkan AI sebagai pendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi perhatian terhadap dampak teknologi ini terhadap demokrasi, rasionalitas publik, dan kapasitas kritis warga masih sangat terbatas. Negara cenderung menganggap tantangan epistemik sebagai efek samping yang tidak mendesak, sementara risiko ekonomi dianggap lebih konkret dan dapat diukur.

Keterlambatan institusional ini mengungkapkan bahwa krisis demokrasi digital bukan sekadar masalah masyarakat atau warga yang belum cukup literat, tetapi juga kegagalan negara dalam membaca perubahan bentuk kekuasaan. Kekuasaan di era digital tidak selalu tampil sebagai perintah langsung atau represi terbuka; ia hadir sebagai desain sistem yang menentukan apa yang dianggap wajar, penting, dan benar. Algoritma, AI, dan platform digital menjadi alat terselubung yang membentuk persepsi, memelihara konsensus pasif, dan menormalisasi praktik informasi tertentu. Negara yang lamban menyesuaikan diri terhadap logika baru ini sesungguhnya membiarkan demokrasi digital berkembang dalam kondisi rapuh, di mana warga menjadi partisipan teknis, tetapi kehilangan kemampuan kritis untuk menilai dan menolak narasi yang disusun oleh mesin dan aktor kepentingan tertentu.

Dalam perspektif ini, demokrasi digital yang tampak hidup dan partisipatif di permukaan sejatinya rapuh di kedalaman. Kekuasaan bertransformasi dari alat represi menjadi arsitektur halus yang menata apa yang dianggap wajar dan benar, sementara negara, yang

³⁴ Kompas. (2024, Februari 12). Rendahnya literasi digital dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial. <https://www.kompas.com>

³⁵ Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity A critical history of social media*. Oxford University Press.

³⁶ Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.

³⁷ Bappenas. (2023). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia*. <https://www.bappenas.go.id>

seharusnya menjadi penjaga rasionalitas publik, masih tertinggal dalam membaca dinamika tersebut. Kondisi ini menegaskan perlunya regulasi yang tidak hanya menekankan kontrol konten, tetapi juga perlindungan terhadap kemampuan publik untuk berpikir kritis, menilai informasi, dan mempertahankan ruang deliberatif yang sehat di era digital³⁸.

Literasi Digital dan Normalisasi Ketidakbenaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital tidak hanya mempermudah penyebaran disinformasi, tetapi juga menormalisasi ketidakbenaran sebagai bagian dari keseharian politik. Disinformasi tidak lagi dipersepsi sebagai penyimpangan, melainkan sebagai variasi wacana yang setara dengan fakta. Ketika semua klaim dianggap setara, kebenaran kehilangan keistimewaannya, dan publik dibiasakan untuk menerima narasi yang paling menonjol, paling konsisten, atau paling emosional, tanpa menguji dasar kebenarannya³⁹.

Laporan resmi pemerintah mencatat ribuan konten hoaks politik setiap tahun, dengan tingkat sebaran yang meningkat menjelang momentum electoral⁴⁰. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi korban disinformasi, tetapi juga pelaku reproduksi narasi yang menyesatkan. Penyebaran informasi terjadi lebih cepat daripada proses evaluasi kritis, sehingga publik aktif secara teknis, tetapi pasif secara epistemik⁴¹.

Fenomena ini diperkuat oleh kajian akademik yang menekankan bahwa disinformasi efektif karena bekerja melalui resonansi emosional dan afeksi, bukan melalui rasionalitas semata⁴². Individu cenderung mempercayai dan menyebarkan konten yang sesuai dengan bias pribadi atau identitas kelompok, meskipun informasi tersebut tidak diverifikasi atau bahkan bertentangan dengan fakta. Dalam kondisi ini, ketidakbenaran tidak hanya diterima, tetapi dibiasakan sebagai bagian dari tata kelola wacana politik, sehingga normalisasi ini menjadi struktur terselubung dari kekuasaan di era digital⁴³.

Akibatnya, demokrasi digital beroperasi dalam paradoks yang tajam: semakin banyak partisipasi publik, semakin sedikit kemampuan warga untuk menilai kebenaran. Publik dilatih untuk bereaksi, bukan untuk berpikir. Ruang digital menjadi ladang di mana opini terbentuk melalui mekanisme sosial dan teknologi, bukan melalui deliberasi kritis, sementara ketidakbenaran menjadi bahan bakar bagi legitimasi narasi yang berkuasa. Normalisasi ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi kapasitas moral dan epistemik yang kritis untuk mempertahankan rasionalitas publik⁴⁴.

SIMPULAN/CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi digital di Indonesia menghasilkan ilusi partisipasi yang dominan bersifat kuantitatif dan simbolik, bukan substantif dan reflektif. Ruang digital yang seharusnya menjadi arena deliberasi publik justru dipenuhi oleh kehadiran angka, viralitas, dan ekspresi emosional, sementara pemahaman kritis dan argumentasi rasional sering kali terpinggirkan. Partisipasi digital yang aktif secara teknis, seperti mengunggah, menyukai,

³⁸ UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms and artificial intelligence*. <https://www.unesco.org>

³⁹ Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder Toward an interdisciplinary framework*. Council of Europe. <https://rm.coe.int>

⁴⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Laporan penanganan konten hoaks dan disinformasi politik. <https://www.kominfo.go.id>

⁴¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks literasi digital nasional 2023*. <https://literasidigital.id>

⁴² Sunstein, C. R. (2017). *#Republic Divided Democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

⁴³ Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.

⁴⁴ UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms and artificial intelligence*. <https://www.unesco.org>

dan membagikan konten, tidak diimbangi dengan kapasitas evaluatif warga untuk menilai kebenaran informasi, sehingga demokrasi tampak hidup di permukaan tetapi kehilangan orientasi dan arah di kedalaman. Kondisi ini menegaskan bahwa semakin banyak suara yang hadir, semakin sedikit makna yang dihasilkan, sehingga partisipasi berubah menjadi ritual yang diulang tanpa refleksi kritis.

Rendahnya literasi digital memperkuat paradoks ini dengan menormalisasi ketidakbenaran sebagai bagian dari keseharian politik. Publik tidak hanya menjadi konsumen pasif dari informasi yang beredar, tetapi juga pelaku reproduksi disinformasi, yang bekerja melalui resonansi emosional, bias afektif, dan logika algoritmik. Artificial intelligence dan algoritma platform digital mempercepat proses ini dengan menghadirkan representasi yang meyakinkan dan konsisten, sehingga kebenaran yang diterima bukanlah hasil verifikasi kolektif, tetapi konstruksi teknologi dan kepentingan sosial-ekonomi tertentu. Warga digital menjadi executor dari narasi yang disusun oleh sistem, bukan evaluator yang berpikir kritis. Akibatnya, demokrasi digital di Indonesia cenderung memproduksi kesadaran pasif yang tunduk pada mekanisme sosial dan teknologi, bukan pada refleksi rasional dan penilaian independen.

Negara, di sisi lain, masih tertinggal dalam menghadapi transformasi kekuasaan ini. Regulasi yang ada lebih menekankan pengendalian konten ilegal dan inovasi ekonomi, sementara perlindungan terhadap rasionalitas publik, kapasitas kritis, dan mekanisme algoritmik masih terbatas. Kegagalan institusional ini memperkuat dominasi narasi dan menormalisasi praktik informasi tertentu, sehingga demokrasi digital berkembang dalam kondisi rapuh. Kesimpulan ini menegaskan bahwa krisis demokrasi digital bukan semata-mata karena pembungkaman, tetapi karena banalitas kebohongan yang diterima, direproduksi, dan dinormalisasi sebagai kebenaran. Literasi digital yang kritis dan regulasi AI yang memadai menjadi kunci untuk mengembalikan demokrasi digital ke jalur deliberatif dan transformatif, di mana partisipasi publik berarti keterlibatan sadar, reflektif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2023). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia*. <https://www.bappenas.go.id>
- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics*. Oxford University Press.
- Bruns, A. (2019). *After the protest explosion: Digital methods for social research*. UCL Press.
- Chadwick, A., & Dennis, J. (2019). Social media, professional media, and mobilization in contemporary Britain: Explaining the strengths and weaknesses of the mediated public sphere. *Political Communication*, 36(1), 50–74. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1476428>
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- Dahlgren, P. (2013). *The political web: Media, participation and alternative democracy*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137283229>
- Flew, T., & Iosifidis, P. (Eds.). (2019). *The Routledge companion to global media and communication policy*. Routledge.
- Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction* (3rd ed.). Sage.
- Grajales, F. J., Shepherd, T., & Torres, A. B. (2020). Algorithmic politics: Political communication in the age of computational propaganda. *Journal of Communication*, 70(2), 298–316. <https://doi.org/10.1093/joc/jqaa006>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds.

- & Trans.). International Publishers.
- Habermas, J. (2006). *The theory of communicative action Vol. 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason* (T. McCarthy, Trans.). Polity Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks literasi digital nasional 2023*. <https://literasidigital.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Laporan penanganan konten hoaks dan disinformasi politik*. <https://www.kominfo.go.id>
- Kompas. (2024, Februari 12). *Rendahnya literasi digital dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial*. <https://www.kompas.com>
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic Divided: Democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tempo. (2023, November 8). *AI, deepfake, dan manipulasi opini publik di era demokrasi digital*. <https://www.tempo.co>
- Tufekci, Z. (2015). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms and artificial intelligence*. <https://www.unesco.org>
- Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework*. Council of Europe. <https://rm.coe.int>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

Cara Mengutip

DEMOKRASI DIGITAL DAN MANIPULASI OPINI PUBLIK DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE. (2026). *Jurnal Persatuan Nasional*, 3(1). <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/22>

Lisensi

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Persatuan Nasional



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).